

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu **“ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP FATWA MUI NO 22 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”**. (studi Pada MUI Pesisir Barat).

Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Analisis menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musibah, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Fiqih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²

¹Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011, 58.

²H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 1.

3. Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 yaitu pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan. Tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan serta adanya pengawasan.³
4. lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain⁴ khususnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan pasir sungai way Pedada.

Beberapa penegasan istilah di atas dapat disimpulkan yang dimaksud Judul Skripsi ini adalah Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan Objektif

Bahwa kerusakan lingkungan lingkungan hidup terjadi karena penambangan pasir sungai menimbulkan longsor, pencemaran air, serta rusaknya ekosistem darat dan mengancam kesehatan masyarakat. Dalam hal ini pertambangan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan

³Fatwa MUI No 22 Tahun 2011

⁴Muhammad Erwin, *Lingkungan hidup*. Jakarta, Gramedia, 45.

masyarakat sekitar, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Alasan subjektif

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas di fakultas syariah di jurusan siyasah
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu program studi siyasah

C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu salah satunya dengan bekerja.⁵ Berkerja merupakan salah satu sebab pokok untuk memungkinkan manusia untuk memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan untuk mencari nafkah. Allah swt menerangkan tentang harta sebagai karunia darinya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha⁶. Dalam islam, bekerja sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.

Dalam konsep dan implementasi, fiqh bi'ah (lingkungan) sebagai perangkat aturan tentang perilaku manusia terhadap lingkungan maupun alam sekitar yang dirumuskan berdasarkan dalil dengan tujuan menciptakan

⁵Mardani, *Hukum bisnis syariah* (Jakarta: kharisma putra utama, 2014), 75.

⁶Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: kalam mulia, cet 2,1999), 39.

kemaslahatan kelestarian lingkungan, lebih tepatnya dari sudut pandang etika islam tentang lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam, karena etika dalam islam sebagai etika religius.⁷

Perkembangan jumlah penduduk yang cepat serta perkembangan teknologi yang semakin maju mengubah pola pikir manusia, sebelumnya kebutuhan manusia hanya terbatas kepada kebutuhan primer dan skunder, kini kebutuhan manusia semakin meningkat kepada kebutuhan tersier yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan primer untuk dapat melangsungkan kehidupan seperti makan, minum, pakaian, rumah dan kebutuhan skunder seperti kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, akan tetapi telah meningkat menjadi kebutuhan tersier yang memungkinkan seseorang memilih kebutuhan yang tersedia. Oleh karena kebutuhan manusia sekarang terbatas semua di tuntut bermotivasi dalam hal mencari ataupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri agar dapat untuk memenuhi kebutuhan guna keberlangsungan hidup.

Salah satu dari motivasi yang ada bagi masyarakat yang ada di bantaran sungai adalah penambangan pasir sungai, tidak lain karena jarak para pemukiman warga yang sangat dekat dengan sungai way pedada. Sungai way Pedada adalah salah satu sungai yang terletak di Kecamatan Way Krui. Hal itu yang dipilih oleh warga sebagian masyarakat desa Pedada, kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, sebagai penambangan pasir sungai dipilih karena menurut mereka lebih mudah untuk dilakukan dan keuntungan yang

⁷Suparman Syukur, *Etika Religis* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004), 196.

menjanjikan tanpa harus merantau ke kota besar. Namun disisi lain melakukan penambangan pasir sungai memiliki resiko yang cukup besar bahkan nyawa jadi taruhannya, bagaimana tidak mereka harus menyelam dengan kedalaman 3-4 meter dan dengan arus yang tidak menentu.

Pertambangan pasir sungai dapat mengubah secara total apabila tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Karena fungsi pasir di dasar sungai adalah menghambat laju aliran sungai sehingga jika pasir disungai menjadi meningkat. Dan menurut salah satu warga yaitu Bapak Muzni. kerusakan yang terjadi jika aliran sungai menjadi meningkat seperti longsor di sepanjang aliran sungai, kualitas air yang menurun rusaknya ekosistem di dalam sungai, kebisingan, dan kerusakan jalan desa.⁸

Frekuensi, ruang lingkup dan masalah yang berkaitan dengan ruang lingkungan hidup dan sumber daya dari waktu ke waktu terus meningkat, kondisi seperti ini sudah di peringatkan oleh Allah dalam firmanya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan lingkungan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah melaksanakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka kembali (kejalan yang benar).” (Q.S ar-Rum : 41).

Fiqih siyasah sebagai salah satu aspek hukum islam yang mengatur hubungan pemimpin dengan suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu

⁸Muzni, Wawancara warga sekitar sungai, Penggawa V Ilir, 19 Februari 2021.

dan fokus dengan penelitian yaitu mengenai dampak kerusakan lingkungan terhadap penambangan pasir sungai. Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah. Jadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana penyelesaian yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang dampak kerusakan lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai way Pedada.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana peran MUI dalam menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang kerusakan lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai way Pedada ?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai peran MUI menerapkan fatwa No 22 Tahun 2011 tentang kerusakan lingkungan terhadap penambangan pasir sungai way Pedada ?

F. Tujuan Masalah Dan Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran MUI dalam menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang kerusakan lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai way Pedada.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah mengenai peran MUI menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang kerusakan lingkungan hidup terhadap penambangan pasir sungai way Pedada.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku, jurnal, skripsi yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Luthfi Maulana yang berjudul “Manusia dan Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur’an” fakultas Ushuludin Universitas Islam Negri WaliSongo Semarang, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa lingkungan adalah sebuah ciptaan yang diperuntukan kepada manusia, membuat sebagian manusia berkuasa atas alam semesta dan kerusakan lingkungan yang terjadi pada alam merupakan hal yang wajar. Semua kepentingan yang bukan berasal dari manusia tidak dianggap berharga, dari sudut pandang ini maka timbullah orang-orang yang serakah kemudian memanfaatkan dan mengeksploitasikan lingkungan secara berlebihan yang cenderung merusak, tanpa mempedulikan keberlangsungan alam.
2. Skripsi yang berjudul “ Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berkenaan Dengan Industri Batu Bata” yang ditulis oleh Jatmiko Yuwono, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015, hasil dari penelitian ini yaitu pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri batu bata di kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) sudah berjalan, tetapi belum maksimal.

BLH Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan di lahan pertanian akibat batu bata dengan cara sosialisasi kepada camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan lingkungan. Belum berjalan dikarenakan (1) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh camat dan lurah kepada pelaku industri dan masyarakat di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul. (2) kurangnya dana anggaran untuk pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan lahan pertanian.

3. Skripsi, yang berjudul “Persepsi Remaja Tentang Pertambangan Pasir Ilegal Dalam Perspektif Pelestarian Lingkungan Hidup di Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”.skripsi ini ditulis oleh Eva Haryani Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Skripsi ini membahas tentang pertambangan pasir ilegal perspektif pelestarian lingkungan hidup di Lampung Tengah.

Dari beberapa penelitian diatas ada beberapa kesamaan objek pembahasan yaitu penambangan, tetapi belum ditemukan adanya penelitian yang memfokuskan pada dampak kerusan lingkungan terhadap penambangan pasir sungai Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang penelitian skripsi yang berjudul ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP FATWA MUI NO 22 TAHUN 2011 TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada MUI Pesisir Barat)

H. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan referensi atau badan untuk diskusi bagi mahasiswa fakultas syari'ah , maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan fiqh siyasah
2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakutas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.⁹ Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun satu daerah.

⁹Karti Kartono, *Pengantar metodologi riset sosial* (bandung: Mandar Maju, cet. VIII, 1999), 102.

Dalam penelitian biasanya dilakukan untuk mengevaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dapat dilakukan dalam sejumlah individu atau unit. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹¹ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari interview dengan Ketua MUI Pesisir Barat, kepala desa, masyarakat umum, pengelola pertambangan, penambang pasir sungai.

¹⁰Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum*, (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), 126.

¹¹Suharsimi Arit kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

b. Data Sekunder adalah data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap, Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitanya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruangan pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan.

¹²Observasi menurut Kartini Karttono adalah “studi sengaja dan sistematis fenomenal sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian prilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.”¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini harus mempersiapkan terlebih

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 148.

¹³Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*)¹⁴.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹⁵ Metode ini menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

4. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.¹⁶

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh simple. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi dikarenakan keterlambatan waktu, dan tenaga

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanpraktif*, (Jakarta: Renika Cipta,2010), 173.

¹⁵*Ibid*, 202.

¹⁶Sidermayanti dan Hisayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung majar maju), 2002, 34.

maka penelitian dapat menggunakan simple yang diambil dari populasi tersebut.¹⁷

Sample yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Propesive sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri atau sifat tertentu yang atau dilihat populasi dijadikan kunci untuk pengambilam sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Sample yangdigunakan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa (1), masyarakat umum (2),Penambang (3), dan Ketua MUI Pesisir Barat, keseluruhan sampel yang diambil berjumlah 7 orang.

c. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam dalam memproses data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah bener, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis dan meragukan.
2. Rekonstruksi data (*Reconsructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis, sehingga mudah dipahami sesuai

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*, (Jakarta: renika cipta, 2010), 173-174.

dengan permasalahan kemudian di tarik kesimpulan sebagai tahap akhir proses penelitian.

3. Sistematis data (*Systematizing*) yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, mengelompokan data secara sistematis yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

d. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan metode analisis data, kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja. Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif.

Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*, secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih* *yafqohu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁸ dan secara etimologi definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-wafa Ibn 'Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah adalah memusatkan perhatian pada aspek peraturan.

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis Siyasah, yaitu Siyasah Dzalimah yang haram Syara' dan Siyasah Adilah yang menegaskan

¹⁸Mujar Ibnu Syarif & Khami Zada. *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga, 2008), 2.

kebenaran, menolak berbagai kejahatan, kerusakan dan mewujudkan tujuan Syara' berkewajiban untuk merujuk pada Siyasah Adilah dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakan kebenaran.¹⁹

Menurut Ali Syariati fiqh siyasah tidak menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarah (*ishal*), sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan bukan pengarah.²⁰ Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah yaitu :

1. Fiqh Dustury
2. Fiqh Maliy
3. Fiqh dawly
4. Fiqh harbiy

Pembedangan fiqh siyasah telah, sedang, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antara manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah. Dalam fiqh tersebut berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan sebagai berikut:

a. Fiqh Siyasah Dusturiyyah

Yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam batas administrasi suatu

¹⁹Irwantoni, "Peran siyasah syar'iyah dalam memahami Nas-Nas Agama" Jurnal Al Adalah, Vol. X No 3 Januari 2012. 270.

²⁰H.A Djazulli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta:Kencana PrenadaMedia Grup,2013), 28.

negara. Dalam fiqh siyasah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashalatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²¹

b. Fiqh Siyasah Maliyyah

Fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Maka dalam fiqh siyasah ada hubungannya di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang-orang kaya dan miskin. Fiqh siyasah ini membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk sistem parlementer para menteri di pimpin oleh perdana menteri, tugas dari lembaga mengharmoniskan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan anantara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar²².

c. Fiqh Siyasah Dawliyyah

Dawliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, sedangkan Siyasah Dawliyyah sebagai kekuasaan kepala Negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga Negara asing. Selain itu juga mengurus masalah kaum Dzimi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum *Dzimi*, *hudud*, dan *qishah*²³.

²¹*Ibid*, 29.

²²*Ibid*, 31.

²³*Ibid*, 31.

d. Fiqh Siyasah Harbiyyah

Siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Fiqh Siyasah Harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh harbiyyah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.²⁴

1. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau bagian dari ilmu fiqh. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasannya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional seperti perang dan traktat.

Objek *fiqh siyasah* menjadi luas sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Terdapat perbedaan argumen di kalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah.

²⁴Sayuti Palungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, 41.

Menurut *Imam al-Mawardi* yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:²⁵

- a) *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b) *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c) *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- d) *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e) *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Menurut Imam Ibn Taimiyyah mendasarkan objek pembahasan ini pada QS. An-Nisa [4]: 58-59 yaitu:


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)²⁶

²⁵*Ibid*, 13.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema), 87.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa: 59)²⁷

Pada ayat 58 berkaitan dengan para pemegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan, pada ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta memenuhi pemerintah.

Di dalam kitab nya Ibnu Taimiyyah membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:

- a) *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- b) *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
- c) *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
- d) *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, *Hasby Ashiddieqy* menyatakan bahwa objek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadhaburannya dengan mengingat

²⁷*Ibid*, 10.

persesuaian pentadhaburan ini dengan jiwa syariah yang tidak bisa diperoleh dalilnya yang merupakan syariah amah yang tetap.²⁸ Hasby membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:

- a) *Siyasah Dusturiyah Syari'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b) *Siyasah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c) *Siyasah Qadla'iyah Syari'iyah* (Kebijakan Peradilan)
- d) *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (Kebijakan ekonomi dan moneter)
- e) *Siyasah 'Idariyyah Syari'iyah* (Kebijakan administrasi negara)
- f) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional).
- g) *Siyasah Taufudziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h) *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (politik peperangan).

Siyasah Maliyyah Syari'iyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Maliyyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

²⁸Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 28.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (Semuanya adalah betul-betul dari Allah). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam dari Allah melalui Malaikat Jibril, Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Ayat- ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman telita para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui penulisan di tempat terpisah. Al-Qur'an disebar luaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.²⁹

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an secara terminologi, hadis berarti tata acara. Menurut pengarang kitab lisan *al-Arab* (mengutip pendapat Syamar) hadist mulanya berti acara atau jalan, yaitu jalan melalui orang-orang dulu kemudian diikuti orang-orang belakangan. Menurut para ahli Usul fiqh, hadis adalah sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau kecepatanya. Hadist ini disebut sebagai cara

²⁹Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 332.

beramal dalam agama berdasarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.³⁰

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pertambangan

Kepemilikan seseorang terhadap suatu benda telah memberikan kekuasaan dan kebebasan untuk memperlakukan atau mengoptimalkan benda yang dimilikinya. Hal demikian sebagaimana disampaikan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam pembahasan masalah *nadhariyah milkiyah*-nya. Menurut beliau mendefenisikan *milk* dan *malakiyah* secara istilah yaitu suatu kekhususan bagi seseorang yang menghalangi orang lain dan membenarkan sipemilik (pemilik benda) untuk bertindak terhadap barang yang dimilikinya sekehendaknya, kecuali ada larangan-larangan syari’at terhadap kehendak tersebut.³¹

Dalam pandangan hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), dengan demikian tiada seorangpun yang berhak menguasainya bahkan memilikinya secara individu. Termasuk dalam hal ini pengelolaan barang tambang tidak boleh dilakukan oleh perorangan (pribadi), karena milik umum maka harus dikelola secara umum yang mana diwakili oleh negara atau pemerintah yang berwenang agar kemanfaatan dari barang tersebut dapat dirasakan oleh umum (masyarakat luas).

³⁰Azimi, *Hadist Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Pesisir Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

³¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, cet. ke-1, (Jakarta:Penerbit Bulan Bintang, 1974), 18.

Berkenaan dengan pengelola barang tambang, ulama kalangan Malikiyah dalam perkataan mereka yang mashur, berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari perut bumi berupa barang tambang tidak bisa dimiliki dengan mengelolanya, akan tetapi barang tersebut menjadi milik Baitulmal kaum muslimin, yakni milik negara (pemerintah). Negaralah yang seharusnya menguasai barang tambang karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola oleh pemerintah dalam suatu negara.³² Karena dikhawatirkan barang tambang semacam ini ditemukan oleh orang-orang yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Jika dibiarkan maka mereka akan membuat kerusakan besar dan kadang kala mereka berebut untuk mendapatkannya yang mengakibatkan pertumpahan darah (saling membunuh). Karena itu harta benda tersebut harus dikumpulkan di bawah kekuasaan pemerintah yang merupakan wakil dari kaum muslimin, yang pemanfaatannya kembali kepada mereka (umat muslim) untuk kemaslahatan.³³ Demikian pula apabila ada seorang atau bahkan sekelompok orang dalam suatu perusahaan (korporasi) yang melakukan kegiatan eksplorasi terhadap barang tambang maka mereka tidak boleh memilikinya, akan tetapi seluruhnya adalah milik umum kaum muslimin yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang kekuasaan pemerintah (negara) untuk mengelola barang tambang yang berlimpah tersebut

³² Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 2910.

³³ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral*, 130.

senada dengan pandangan seorang ahli ekonomi Islam, Taqyuddin an-Nabhani, bahwa negaralah yang melakukan pengelolaan hak milik umum (*collective property*) serta milik negara (*state property*). Harta benda yang termasuk hak milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Air, garam, padang gembalaan dan lapangan misalnya, negara sama sekali tidak boleh memberikannya kepada siapapun, meskipun semua orang boleh memanfaatkannya dimana kemanfaatan tersebut merupakan hak mereka, dan tidak mengkhususkannya untuk satu orang saja, sementara yang lain tidak.

Ibnu Qudamah dalam kitab besarnya Al-Mughni tentang *Ihyau al-Mawat* mengatakan: Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan hasilnya dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain yang tidak bisa dihakmilikkan penggarapannya, tidak boleh dipertahankan hak kepemilikannya kepada seseorang sehingga kaum muslimin lainnya terhalang untuk mendapatkannya. Hal ini akan membahayakan, menyulitkan dan merugikan mereka. Karena barang tambang tersebut adalah milik umum, maka harus diberikan kepada negara untuk mengelolanya.³⁴

Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fiqh siyasah. Umar bin al-Khathab, memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara, barang tambang

³⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, cet. ke-2, (Kairo: Hajar, 1992 M/ 1412 H), VIII: 155.

telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan dunia kepadanya bertambah dengan sangat besar. Sedangkan diantara karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor probabilitas (kemungkinan).³⁵

Maksudnya adalah bahwa upaya pencarian dan penelitian seringkali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksploasiannya. Itu berarti bahwa memberikan kepada individu hak kepemilikannya dan pengeksploasiannya atau pengelolaannya akan berdampak pada pemusatan kekayaan (monopoli) di tangan mereka secara individu, yang selanjutnya akan berdampak pada kerancuan proses distribusi dan akan menafikan keadilan bagi semua warga negara pemilik sesungguhnya barang tambang tersebut.

4. Pengertian Ulil Amri

Ulil amri adalah sebuah jabatan atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara Republik, monarki federasi, persekutuan dan bentuk-bentuk lainnya. Penguasa mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Adanya Negara adalah melalui kontrak sosial atau perjanjian atas gelar sukarela.³⁶

Ulil amri ada tiga macam yaitu *pertama*, pakar dalam ahli pikir mengenai perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan

³⁵Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar*, 232-235.

³⁶*Ibid*, 13.

telah dipercaya atau dipilih untuk urusan tersebut. *Kedua*, para penguasa dan juga para umara. *Ketiga*, para pakar yang menjadi rujukan dalam yang berkaitan dengan undang-undangan haram maupun halal.

Apabila *ahlul 'l-Halli wa 'l-Aqdi* dari kaum mu'minin telah ber*ijma'* (sepakat) atas sesuatu urusan di antara kemsalahatan-kemaslahatan umum yang tidak ada *nash*-nya Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak terpaksa, maka menaatinya adalah wajib.³⁷ Imam Muhammad Abduh juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah *ahlul hilli wal aqdi* yang terdiri dari kaum muslim. Kaum yang dimaksud adalah mereka yang terdiri dari para umara, para ilama, para hakim, para komandan militer, dan para pemuka yang dijadikan rujukan oleh para manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan umum.

Dengan begitu, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah ulil amri yang dimaksud dalam kitab Allah. Merekalah yang mengatur sekaligus dua kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Ada juga yang menyebut bahwa ulil amri adalah para hakin dan wakil rakyat.

Jadi ulil amri adalah *Ahlul Halli wal Aqdi*, atau bisa disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dari golongan yang disebut pemimpin dan juga umara. Hal ini berarti, ulil amri disebut juga dengan Dewan legislatif di zaman sekarang.

³⁷Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Penerbit tuha Putra Semarang, 1986), 119.

Ada pun yang menyebut dengan kelompok para penguasa dari pejabat dengan sebutan “ulil amri bidang eksekutif” sedangkan kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah “ulil amri bidang legislatif dan juga dewan pengawas pejabat”.³⁸

Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam fiqh siyasah

a. prinsip persatuan dan persaudaraan

persatuan serta persaudaraan tidak mungkin terwujud kalau tidak ada saling kerjasama juga mencintai, setiap jamaah yang tidak diikat melalui ikatan kerja sama serta ikatan kasih sayang juga persatuan yang sebenarnya, tidak mungkin bersatu dalam dalam suatu prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan dan persaudaraan suatu jamaah merupakan fondasi dan faktor-faktor terbentuknya sebuah negara yang kokoh. Persaudaraan itu mengajarkan suatu prinsip keyakinan yang tidak membedakan antar bangsa-bangsa, ras, dan sebagainya. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan yang begitu luas yang mana meliputi semua golongan.

Baik dalam piagam madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan dikalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan islam dan non islam di berbagai aspek kehidupan. Hal ini memperlihatkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat islam saja.

³⁸Farid Abdul Khaliq, *fiqh politik Islam*, 84-87.

b. prinsip Kebebasan

kebebasan adalah hak dasar hidup setiap orang serta merupakan pengakuan dari seseorang atau kelompok dan kemulyaan harkat kemanusiaan orang lain. kebebasan dibutuhkan manusia untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang terdiri atas golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, agama, kultur, ekonomi maupun keyakinan. Apabila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan antara satu dengan yang lain.

Karena itu kebebasan mutlak dan perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya untuk terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Adanya beberapa kebebasan yang dibutuhkan manusia yaitu, kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan beragama, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari pengiayaan, dan masih banyak kebebasan yang lain.³⁹

c. prinsip ketaatan kepada pemimpin

merupakan suatu niscahnya dalam negara, bagi rakyat untuk menaati penguasa. Disini undang-undang politik islam hanya memerintah setiap warga negara untuk menaati penguasa selama pemerintahanya tidak melanggar syari'at islam.

³⁹*Ibid.* 156.

d. prinsip pelaksanaan hukum

pemerintah berlaku adil yang berkaitan dengan berbuat kebaikan (ihsan), larangan berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Berbuat kebaikan berarti memenuhi dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Baik hukum terlaksana, maka keadilan pun terpenuhi.

Bidang aktivitas hidup manusia lain yang dituntun oleh Al-Qur'an dari setiap orang yang berlaku adil adalah bidang takaran dan timbangan, yaitu menyempurnakannya dengan adil. Penimbangan atau penangkar harus menakar atau menimbang sesuatu secara jujur. Ia tidak boleh mengurangi sedikit pun yang terjadi hak orang lain, sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka orang lain terhadapnya.⁴⁰

e. prinsip perdamaian

Perdamaian merupakan ajaran dasar yang penting dalam islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antara sesama manusia baik antar kelompok sosial maupun antar bangsa, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hubungan ini Al-Maududi menyatakan “muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat dan damai, muslimin juga bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, 229.

⁴¹*Ibid.*, 204

f. prinsip Musyawarah

kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya dari pada demokrasi, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa sampai rakyat biasa.⁴² Ketika Nabi membawa berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan kota makkah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menetapkan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belajar perang, dan jumlah pasukan mereka. Beliau meminta sikap dan pendapat kaum Ansar sebagai golongan terbesar kaum muslimin dalam menghadapi perang tersebut. Dan beliau mendapatkan dukungan dari kaum Ansar dan mereka bersedia mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi Muhammad Shallallah ‘alaihiwasallam.⁴³

Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenangan-wenangan yang terlarang. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta’ala. Menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak seorang pun yang merasa dizalimi.⁴⁴

⁴²Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik, 52.

⁴³J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-quran*, 209.

⁴⁴*Ibid.*, 51.

g. Pinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu perintah paling banyak dalam Al-Qur'an, prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh suatu pemimpin dalam pemerintah, apapun bentuk pemerintah itu. Dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus mewujudkan melalui hukum yang ada. Keadilan dapat dipahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

⁴⁵Disini seseorang harus bertindak adil terhadap rakyatnya, sesuai dengan garis-garis besar haluan islam. Sebagaimana yang dikaitkan Al-Mawardi dalam buku monumentalnya *Al-ahkam as-hulihaniayah* menjelaskan bila seorang penguasa keluar dari keadilan, maka ia harus disingkirkan dari kursinya dan dilarang mentaati perintahnya ⁴⁶

B. Lingkungan Hidup

1. Definisi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terjemahan dari istilah *environmendalam* bahasa inggris *L'encironmen* dalam bahasa Prancis *Umwelt* dalam bahasa Jerman. Istilah lingkungan hidup tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.⁴⁷

Lingkungan hidup yaitu lingkungan yang dilihat sehari-hari atau disekeliling manusia, istilah lingkungan jarang sekali digunakan dalam

⁴⁵Efa Rodiah Nur, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No 2 (April 2016), 121.

⁴⁶M. Sidi Ritaudin, Aspirasi Politik Islam "*Jurnal Tapis Teropong, Fakultas Ushuludin Iain Raden Intan Lampung*", Vol. 1, (2005), 63.

⁴⁷Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 1980, 62.

rangka etimologi taupun terminologi. Pandang Yusuf Al Qardawi misalnya, dalam mendefinisikan lingkungan hidup adalah sebuah lingkup manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika berpergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat manusia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa.⁴⁸ Namun secara praktis kita selalu memberikan batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat dibutuhkan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut. Faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karna itu lingkungan hidup harus di artikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁹

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengertian lingkungan hidup ada beberapa pengetahuan tentang lingkungan hidup yaitu :

Lingkungan hidup adalah semua benda daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia dan makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Lingkungan hidup sering disebut lingkungan yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi, yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia yang berlebihan.⁵⁰

⁴⁸Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, 5.

⁴⁹Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2005, 48.

⁵⁰N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta:Erlangga, 2004, cet. II. 4.

Ensiklopedia Amerika menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk sekitar lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.⁵¹

Otto Soemarwoto, dalam hal ini mendefinisikan lingkungan hidup merupakan sejumlah benda dan kondisi yang ada dalam ruangnya kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵²

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbicara tentang lingkungan hidup kita dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan

⁵¹Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2008, 25.

⁵²Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia pustaka utama, Jakarta, 1972, 2.

lingkungan biota yang rumit (complex). Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungan.⁵³

Faktor-faktor lingkungan dalam ekologi terbagi menjadi dua, yaitu meliputi lingkungan abiotik, yaitu segala apa yang ada dalam lingkungan sekitar makhluk hidup yang berupa benda mati, seperti tanah yang mengandung senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, air, udara, intensitas sinar matahari. Lingkungan yang lain adalah lingkungan biotik yaitu segala apa yang ada berupa organisme yang ada di sekitar makhluk hidup.

Berkaitan dengan jenis-jenis lingkungan hidup ini banyak tokoh-tokoh lingkungan hidup yang berpendapat dan disini ditemui banyak kesamaan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Tresna Sastra Wijaya, jenis-jenis lingkungan hidup terdiri dari lingkungan fisik yang terdiri dari semua benda yang hidup serta kondisi ruangan yang kita tempati, lingkungan sosial yang meliputi manusia sekitar.⁵⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Emil Salim bahwa jenis-jenis lingkungan ini disamping lingkungan fisik, yang mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia, yang dalam pengertian ini terlihat sangat luas sekali, juga lingkungan alam dan lingkungan sosial.⁵⁵

⁵³Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Penambangan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, cet II, 6.

⁵⁴Teresna Sastra Wijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, 6.

⁵⁵Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Penambangan*, Mutiara, Jakarta, 1982, 34.

Pembagian jenis-jenis lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto, tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan hidup, lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budanya.⁵⁶

Pengelompokan jenis-jenis lingkungan atas dapat disimpulkan menjadi beberapa macam. Secara garis besar lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Lingkungan fisik (*biolocal environment*) adalah segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, air, sinar matahari, dan lain-lain macamnya
2. Lingkungan biologis (*biolocal environment*) adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, teman dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*) adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.

C. Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2009 kerusakan lingkungan hidup tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. rusak dalam

⁵⁶Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1972, 30.

arti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai mana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa semakin berkurangnya atau mendekati kepunahan bahkan mungkin telah punahnya sama sekali. Rusaknya lingkungan terjadi karena dua hal, Alam dan Perbuatan manusia

Kedua hal ini sangat erat kaitanya kerusakan yang disebabkan oleh alam seperti tanah longsor dan banjir karena lingkungan (hutan sungai dan tanaman) yang gundul atau kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti adanya penghijauan kembali.⁵⁷

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, lingkungan hidup sebagai sumber daya yang mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksplotasi atau penggunaannya dibawah batas adanya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui padat digunakan sebagai lestari. Apabila batas lampau, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁵⁸

Masalah lingkungan hidup muncul karena adanya pengeksploitasian sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang menyebabkan peningkatan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan berbagai masalah dilingkungan hidup terutama oleh adanya usaha kegiatan pertambangan. Disamping itu juga kegiatan galian pertambangan banyak menimbulkan persoalan dalam

⁵⁷ Muhammad Erwin, *Lingkungan hidup*. Jakarta, Gramedia, 48.

⁵⁸ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djambatan, 2001, 5.

masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, kondisi masyarakat disekitar pertambangan yang sangat memperhatikan.⁵⁹

Kerusakan lingkungan jenis lain adalah pencemaran. Pencemaran yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan atau berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam yang mengakibatkan turunya kualitas lingkungan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Adanya ekologiwan yang memberi definisi pencemaran adalah gangguan suatu habitat oleh zat yang menyebabkan kurangnya organisme. Ekologiwan yang lain mendefinisikan pencemaran sebagai segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam jumlah yang demikian banyak sampai bisa mengganggu kesehatan dan kesejahteraan manusia.

a. Macam-macam pencemaran lingkungan

1. Pencemaran Sungai

Pencemaran sungai yaitu peristiwa masuknya komponen zat atau campur tangan manusia kedalam permukaan sungai, sehingga kualitas sungai terganggu, sumber pengarnya ialah pengikisan tanah dari permukaan sungai sehingga terjadinya longsor dan pengikisan di sekitar sungai, limbah industri, limbah rumah tangga.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya zat-zat energi, atau komponen lainnya kedalam lingkungan udara. Akibatnya kualitas udara

⁵⁹*Ibid*, 32.

menurun sehingga mengganggu kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara pada umumnya terjadi di kota-kota besar dan daerah industri (pabrik). Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bahan bakar dari kendaraan bermotor dan gas buangan pabrik.⁶⁰

3. pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya kedalam suatu areal tanah, akibatnya dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Adapun yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain yaitu :

- a. Terganggunya kehidupan mikro organisme tanah
- b. Berubahnya sifat kimiawi atau sifat fisik tanah, sehingga tanah tidak baik (tidak subur) untuk pertumbuhan tanaman.
- c. Mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis dalam suatu ekosistem.⁶¹

4. Penambangan Pasir Sungai

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian dari bawah permukaan tanah baik dari lahan maupun dari bawah aliran sungai dengan maksud mengambil jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai ekonomis.⁶²

⁶⁰Saktiyono, *IPA BIOLOGI*, 159.

⁶¹Saktiyono, *IPA BIOLOGI*, 162.

⁶²*Ibid.*, 43.

Penambangan pasir sungai merupakan suatu proses pengambilan pasir yang dilakukan manusia untuk mendapatkan pasir sehingga menimbulkan dampak yang luas bagi manusia disekitarnya.

a. Tujuan dan Fungsi penambangan pasir

Aktivitas penambangan pasir sungai dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka masyarakat sekitar tetap melakukan penambangan pasir sungai. Memanfaatkan sungai sebagai tempat penambangan, sehingga dapat menimbulkan dampak kerusakan ekosistem, banjir, longsor di sekitar pemukiman sungai. Dengan dalih kegiatan penambangan lebih banyak tujuan manfaatnya berupa penyediaan bahan baku bangunan dan pembangunan rumah-rumah pemukiman, gedung-gedung yang pembangunannya menggunakan pasir sungai.

b. jenis-jenis pasir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pasir adalah lapisan tanah yang ditimbulkan krikil halus. Pasir tanah adalah pasir yang berasal dari tanah yang diambil dengan cara digali serta penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah. Panggilan yang melebihi batas dapat menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap lahan milik lainnya maka panggilan harus segera di hentikan, walaupun penggalian belum mencapai 1,5 meter. Adapun 5 jenis pasir yaitu :

1) pasir merah

Pasir merah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Konsituen utamanya yakni silisium juga dapat diolah menjadi silikon, salah satu bahan semikonduktor yang dipakai untuk memproduksi penantian-penantian elektronik, selain itu pasir merah merupakan bahan utama untuk pembuatan beton bangunan, bahan pengecoran yang mempunyai ketahanan yang cukup baik.

2) pasir elod

Pasir elod adalah memiliki ciri-ciri yang bisa digumpalkan dan tidak akan puyar kembali. Pasir ini masih memiliki campuran tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk plasteran dinding, atau untuk campuran batako.

3) pasir pasang

Pasir pasang yang tidak jauh dari pasir elod lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal akan menggumpal dan tidak kembali ke semula. Pasir pasang biasanya digunakan untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk plasteran dinding.

4) pasir beton

Pasir beton adalah pasir yang warnanya hitam dan butirannya cukup halus, namun apabila dikepalkan dengan tangan tidak menggumpal dan akan puyar kembali. Pasir ini tidak baik untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, pemasangan bata dan batu.

5) Pasir Sungai

Pasir sungai adalah pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir jenis ini butirannya cukup baik (antara 0,063 mm – 5 mm) sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Niasanya pasir ini hanya untuk bahan campuran saja.⁶³

b. karakteristik penambangan pasir sungai

Penambangan pasir sungai ialah sesuatu pekerjaan yang dibuat oleh manusia dengan cara mengumpulkan pasir yang dijual keberbagai desa guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. adapun jenis penambangan pasir dibagi menjadi dua yaitu :

1. Penambangan pasir secara tradisional

Penambangan pasir secara tradisional adalah penambangan yang menggunakan alat secara manual atautradisional. Dengan alat yang digunakan sangat tradisional, serta alat tersebut dipergunakan tanpa dibantu dengan tenaga mesin (manual). Untuk penambangan pasir tradisional biasanya berkerja sama dan dilakukan pada lokasi yang sama, sehingga penghasilan juga dibagi sama rata.

2. Penambangan pasir modern

Penambangan pasir secara modern adalah penambangan yang menggunakan alat yang sudah canggih, jenis penambangan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan cara mekanik dan alat-alat berat yaitu

⁶³Suharso dan Ana Retnoningsih.2009,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang.Cv.Widya Karya, 362.

mesin penyedot pasir, biasanya disebut dengan diesel. Alat tersebut memudahkan masyarakat untuk penambangan akan lebih mudah melakukan penambangan pasir secara cepat dengan waktu yang relatif singkat. Hasil penambangan pasir sangat banyak jika dibandingkan dengan cara tradisional, serta dengan tenaga yang relatif sedikit.

c. Dampak Yang Ditimbulkan Penambangan Pasir Sungai

1. dampak positif dari penambangan pasir sungai

penambangan pasir sungai yang dilakukan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar sungai tersebut. Bahan bangunan berupa pasir itu dapat dibeli di tempat yang tidak jauh dari pemukiman masyarakat sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga serta lebih efektif dan efisien.

2. dampak negatif dari penambangan pasir sungai

dampak negatif dari penambangan pasir sungai menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan disekitar tempat tersebut. Kerusakan lingkungan tersebut diantaranya menimbulkan kubangan dan retaknya pondasi di bibir sungai sehingga dapat menyebabkan tebing disekitar sungai longsor dan mengikis pemukiman warga.

D. Hukum Pertambangan Menurut MUI

Dalam memanfaatkan sumber data alam pertambangan hampir semua perusahaan pertambangan maupun pertambangan rakyat saat ini lebih mementingkan faktor ekonomi dibandingkan faktor-faktor moral dan etika lingkungan. Pandangan agama islam mempunyai konsep dan sangat jelas

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi munkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).

Pelaksanaan pertambangan yang islam harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan berkelanjutan, dan melakukan reklamasi, restorasi atau rehabilitasi. Ataupun pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD. Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan, antarlain menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur edrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan glabal, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengecam kesejahteraan masyarakat.

Fatwa majelis ulama indonesia (MUI) bersama kemetrian Lingkungan hidup dalam upaya merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam (khusus pertambangan) harus sesuai dengan kaidah syariah. MUI telah menandatangani

memorandum of understanding (MUI) No 14/MLNH/12/2010 dan kep-621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 desember 2010, telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Fatwa MUI ini merupakan pendekatan moral dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. adapun fatwa MUI ini bertujuan untuk :

1. Memperkuat Penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
3. Sebagai salah satu upaya untuk menetapkan sanksi moral dan etika bagi pelaku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya disektor pertambangan.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat

1. Geografis

Kabupaten Pesisir Barat terletak pada Koordinat $4^{\circ},40',0''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ},30',0''$ - $104^{\circ},50',0''$ Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pesisir barat memiliki luas $\pm 2.907,23 \text{ Km}^2$ atau 8,39% dari Luas wilayah provinsi lampung, dengan mata pencaharian sebagian penduduknya sebagai petani dan nelayan. Wilayah kabupaten Pesisir Barat secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dengan 116 desa (di Pesisir Barat di sebut Pekon) dan 2 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar ± 136.370 jiwa.

Kabupaten Pesisir Barat berbatasan dengan Sebelah Utara dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanggamus; Sebelah Selatan dengan Samudera Hindiadan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

Luas wilayah wilayah kabupaten Pesisir Barat adalah $2.907,23 \text{ Km}^2$ di mana kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Bangkunt yaitu sebesar $943,70 \text{ Km}^2$ dan yang paling sedikit adalah kecamatan Krui Selatan yaitu sebesar $36,25 \text{ Km}^2$. Agar lebih jelas luas wilayah Pesisir Barat menurut kecamatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini .

Tabel 1.1
Luas wilayah kabupaten pesisir barat menurut kecamatan 2017

NO	KECAMATAN	Luas (Km ²)	PERSENTASE
1	Lemong	454,97	15,65
2	Pesisir Utara	84,27	2,90
3	Pulau Pisang	64,00	2,20
4	Karya Pengawa	211,11	7,26
5	Way Krui	40,92	1,41
6	Pesisir Tengah	120,64	4,15
7	Krui Selatan	36,25	1,25
8	Pesisir Selatan	409,17	14,07
9	Ngambur	327,17	11,25
10	Ngaras	215,03	7,40
11	Bangkunat	943,70	32,46
JUMLAH		2.907,23	100,00

Tabel 1.2
Nama Gunung Dan Tinnggi Dari Permukaan Laut Di Kabupaten
Pesisir Barat 2016

No	Nama Gunung	Tinggi (m)	Terletak Di Kecamatan
1	Gunung Sebayon	1.744	Pesisir Tengah
2	Gunung Pugug	1.964	Pesisir Utara
3	Gunung Telalawan	1.753	Pesisir Utara
4	Gunung Tampak Tunggak	1.749	Pesisir Utara

Sumber: Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, 2016

2. Demografis

Jumlah penduduk kabupaten pesisir barat berdasarkan praeksi penduduk BPS tahun 2017 adalah 152.529 jiwa yang terdiri dari 80.034 laki-laki dan 72.495 perempuan (dengan rasio jenis kelamin sebesar 110). Dengan luas wilayah 2.346,07 Km², pesisir barat memiliki rata-rata kepadatan penduduk sekitar 65 orang/Km². jika di bandingkan dengan proyeksi penduduk tahun 2016, prertumbuhan penduduk pesisir barat sebesar 0,82%.

Tabel 1.3
Luas wilayah dan jumlah penduduk menurut kecamatan, 2019

NO	Kecamatan	Luas km	Penduduk	Kepadatan Penduduk(km)
1	Lemong	64,00	10,602	41
2	PesisirUtraa	21,11	9.070	43
3	Pulau Pisang	120,64	1.612	13
4	KaryaPenggawa	40,92	15.410	377
5	Way Krui	36,25	9.256	255
6	PesisirTengah	495,97	18.810	41
7	Krui Selatan	409,17	9.993	24
8	Pesisir Selatan	84,27	24.375	289
9	Ngambur	327,17	20.218	62
10	Ngaras	215,03	8.494	40
11	Bangkunat	943,70	26.112	26
JUMLAH		2.907,23	155,497	53

3. Monografis

Ketersediaan pendidikan sekolah mulai dari jenjang taman kakak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah di Kabupaten Pesisir Barat tergolong cukup memadai. Keberadaan sejourah tersebut tersebar diseluruh kecamatan yang ada di pesisir Barat. Selain sekolahan umum, sekolah berbasis Agama mulai dari MI, Mts, hingga MA

juga tersedia, hal ini turut mendukung mayoritas penduduk Pesisir Barat yang tergolong 98 persen sebagai pemeluk Agama Islam.

Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2017, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 51,84 persen dengan kontribusi pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbang 0,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar berlaku.

Tabel 1.4
Jumlah Sekolah Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak, 2017

No	Nama Kecamatan	Sekolah	Guru	Murid
1	Lemong	16	152	1373
2	Pesisir utara	12	144	1104
3	Karya Penggawa	11	122	1712
4	Way Krui	5	49	592
5	Pesisir Tengah	11	170	2367
6	Krui Selatan	8	82	1109
7	Pesisir Selatan	17	191	2835
8	Ngambur	11	152	2241
9	Ngaras	7	77	1112
10	Bangkunat	16	210	3086
11	Pulau Pisang	2	20	131
Jumlah / Total		116	1313	17662

B. Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk

1. Pembagian Wilayah

Wilayah Kabupaten Pesisir Barat secara Administrasi dibagi menjadi 11 Kecamatan

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Ibu kota / Kecamatan serta jumlah Desa

NO	Kecamatan	Ibu kota	Desa
1	Bangkunat	Way Heni	11
2	Ngaras	Siging	11
3	Ngambur	Pasar Minggu	7
4	Pesisir selatan	Biha	9
5	Krui selatam	Way napal	9
6	Pesisir tengah	Krui	8
7	Way Krui	Gunung kemala	10
8	Karya Penggawa	Penggawa V Ilir	7
9	Pesisir Utara	Pugung Tampak	10
10	Lemong	Lemong	11
11	Pulau Pisang	Pasar p pisang	6
JUMLAH			99

Sumber: *BPS Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017*

Berdasarkan Table diatas juga dapat dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan sebanyak 11 dari ibukota kecamatan dan 99 dari Desa.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah aset yang paling penting bagi pembangunan suatu daerah. Penduduk juga merupakan subjek dan objek dari suatu pembangunan. Perkembangan penduduk dari waktu ke waktu yang cukup pesat disebabkan karena adanya tingkat kelahiran yang tinggi serta tingkat kematian yang rendah selain itu, tingginya pertambahan penduduk juga disebabkan oleh arus imigrasi yang menyebabkan penduduk di suatu daerah bertambah.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2009-2016

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2009	140.641
2	2010	142.228
3	2011	143.815
4	2012	145.419
5	2013	145.129
6	2014	148.412
7	2015	149.890
8	2016	151.288
JUMLAH		1.166.822

C. Deskripsi MUI Pesisir Barat

Awal mulai berdirinya MUI Pesisir Barat, setelah Pesisir Barat pemekaran atau memisahkan diri dari Lampung Barat. Dan mulai membentuk kepengurusan dan menutukan sekreteriat. Untuk membentuk sebuah dibuatlah struktur sementara yang ditunjuk sebagai ketua sementara yaitu bapak KH. M. Nurhadi. M.pd.I, yang menjadi Ketua Umum sekarang. Sekaligus rumahnya dibuat sebagai kantor atau sekreteriat, yang berlamatkan di jl. Pesanten II Pagar Baru Krui Pesisir Tengah. Sedangkan awal pemekaran tahun 2012 Kabupaten Pesisir Barat yang sebelumnya masih termasuk wilayah Lampung Barat. Jadi awal berdirinya Lembaga MUI Pesisir Barat sekitar tahun 2012. Adapun struktur Majelis Ulama Indonesia Pesisir Barat sebagai berikut :

Ketua Umum	: KH. M. NURHADI, M.Pd.I
Ketua 1	: Drs. KADARUSMAN Z. M.Pd.I
Ketua 2	: FAHRI NUR, S.Pd.I
Ketua 3	: Ust. HOTMAN SUARSA, S.Pd.I
Ketua 4	: AKBAR TEGUH SUMANTRI, Bc.Hk.
Ketua 5	: Ust. AGUS MAWARDI
Ketua 6	: SYAMSUL BASYAR
Ketua 7	: MEI SALKO, A.Md. Sd
Sekretaris Umum	: AHMAD KHOTOB, S.Ag.
Sekretaris 1	: SAKDAN, S.Fil.I
Sekretaris 2	: BETYANTO, S.Sy
Sekretaris 3	: ILZAM MUTTUKO

Sekretaris 4	: FARID MAKMUR, S.Ag
Sekretaris 5	: SYAIFUL MUARIFIN, S.Pd.I
Bendahara umum	: MAT YUSUF, S.Kom
Bendahara 1	: HEFZON KURNIA, M.Pd.I
Bendahara 2	: MARLIN MUSLIM ⁶⁴

D. Peran MUI Pesisir Barat Dalam Menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Way Pedada

Peran MUI Pesisir Barat dalam menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 di peroleh dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat yang melakukan penambangan pasir, agar dapat memberikan arahan agar tidak melakukan penambangan pasir yang menjadi kerusakan lingkungan, adapun faktor kelemahan dan faktor peluang, yang salah satunya faktor berasal dari kebijakan pemerintah yaitu faktor kelemahan, sedangkan faktor peluang adalah faktor yang disebabkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan pasir sungai.

Dalam prosedur penambangan pasir sungai way pedada yang dijalankan oleh masyarakat tidak ada izin dari instansi terkait ataupun Pemerintah Desa. Akan tetapi masyarakat terus melakukan aktivitas penambangan pasir sungai dan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi dalam penambangan tersebut.

⁶⁴KH. M. Nurhadi, M.Pd.I, Ketua MUI Pesisir barat, *Sejarah MUI Pesisir Barat*, bertatap muka (20 Januari 2021)

Peran MUI dalam memberikan penyuluhan tentang Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 belum maksimal sehingga menurut tokoh Agama dan tokoh Adat masyarakat sekitar, belum pernah mendengar tentang fatwa tersebut meski pun dalam bentuk sosialisasi. Dan masyarakat terus melakukan kerusakan lingkungan dalam bentuk pertambangan pasir. Karena mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa MUI tersebut.

Wawancara dengan bapak Ahmad Khotob, S.Ag. ⁶⁵ selaku sekeretaris MUI pesisir barat, karena peran MUI itu sebagai pengarah dan memeberikan penyuluhan, agar dapat mengarahkan masyarakat unuk tidak melakukan penambngan pasir sungai, dan sudah tertuang di Fatwa MUI Pesisir Barat No 22 Tahun 2011, tentang pertambangan ramah lingkungan. Pertambangan boleh dilakukan tetapi tidak merusak ekosistem sungai dan tidak menimbulkan bencana, ataupun merugikan masyarakat.

Dalam hal ini lembaga MUI juga mempunyai kelemahan dalam mengatasi dampak penambangan pasir sungai Way Pedada, dan tidak ada sanksi untuk penambangan peraturan Pemerintahan Desa, sehingga penambang dengan bebas melakukan aktivitas penambangan akan tetapi dalam hal ini ada Fatwa MUI (No : 22 tahun 2011) setiap orang atau badan tidak boleh melakukan penggalian atau pengerukan tanah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan pejabat dan yang berwenang, tidak merusak ekosistem sungai ataupun menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

⁶⁵Wawancara dengan bapak Ahmad khotob, sekeretaris MUI Pesisir Barat, Februari 2021.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengenai aktivitas penambangan, maka masyarakat Penggawa V Ilir menganggap bahwa kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan yang tidak melanggar hukum dan menghasilkan peluang ekonomi yang lebih untuk menyokong kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan dampak kerusakan yang akan terjadi kedepannya.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Penambangan Pasir Sungai

Dalam Fatwa MUI NO 22 tahun 2011 Tentang Penambangan Ramah Lingkungan yang berbunyi setiap orang boleh melakukan penambangan yang tidak mendatangkan kerusakan lingkungan, serta sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, serta perlu adanya pengawasan berkelanjutan, dalam fatwa tersebut sudah cukup baik dan memadai sebagai landasan dalam mengelola pertambangan pasir yang berwawasan lingkungan, akan tetapi dalam penerapan sangat sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan banyaknya tantangan dan kendala yang menghambat konsekuensi pelaksanaan aturan kebijakan, misalnya dalam penerapan aturan perizinan penambangan pasir pada saat penelitian tidak ada satu pun yang mempunyai surat izin pertambangan daerah (SIPD).

Permasalahan mendasar dalam peraturan regulasi penambangan pasir sungai dilihat dari sisi pemegangan kebijakan yaitu pemerintahan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sisi internal pemerintahan daerah itu sendiri serta

dari sisi eksternal lembaga MUI daerah. Permasalahan internal yang terjadi diantaranya adalah antara kelembagaan pemerintahan kurang kordinasi, aparatur pemerintahan kurang profesional, anggaran oprasional terbatas dan sarana prasarana yang terbatas. Permasalahan internal tersebut berakibat kurang optimalnya pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan peraturan yang berlaku.

Permasalahan eksternal berasal dari luar lingkupan pemerintah daerah, misalnya permasalahan yang berasal dari masyarakat, penambang, perusahaan ataupun pengelolaan tambang atau pengelolaan swadaya masyarakat desa. Seperti Faktor ekonomi,

Permasalahan ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan dalam mengelola penambangan pasir sungai, diantaranya adalah kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan hidup, tuntutan menghadapi kehidupan dari masyarakat, kurangnya penelitian sebagai informasi dalam mengambil kebijakan pemerintahan dan kritik dari lembaga swadaya masyarakat yang pada umumnya kurang respek terhadap usaha pertambangan. Oleh karna itu kontrol secara terus menerus dari pemerintahan terhadap setiap kegiatan penambangan pasir sungai perlu di upayakan, kurangnya kegiatan sosialisasi tentang fatwa MUI disertai pengawasan dan pengendalian bersama antara berbagai pihak yang terkait diharapkan dapat bekerja sama terpadu dan berkelanjutan.

Pada prinsipnya pengaturan kebijakan pemerintahan dalam penambangan pasir sungai adalah mengupayakan suatu sistem pengelolaan penambangan

yang berwawasan lingkungan dan menjaga keseimbangan material yang terambil di dasar sungai maupun bibir sungai agar tidak terjadi kerusakan ekosistem, maupun terjadi longsor dibagian bibir sungai, sehingga tidak mengikis lahan warga maupun masyarakat.

F. Tanggapan Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup

Wawancara dengan Bapak Saipuloh selaku penambang,⁶⁶ yaitu saya tidak pernah mendengar tentang Fatwa tersebut, kemungkinan saya sibuk menambang atau saya ketinggalan info, tanggapan saya bagai mana lagi untuk menghidupi keluarga, selagian itu tidak ada yang menghalang, dan tidak di penjarakan, dan juga kegiatan ini di lakukan sejak dahulu kala, sejak nenek moyang.

berdasarkan penjelasan bapak Mat Ali memang keterbatasnya lapangan pekerjaan dan banyak kebutuhan hidup yang akan dipenuhi maka mereka melakukan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara menambang pasir sungai tersebut.⁶⁷

Wawancara dengan bapak Darwindi selaku masyarakat sekitar. Kerusakan yang terjadi semenjak adanya penambangan pasir, longsor di bagian tepi sungai atau dinding sungai yang mengikis persawahan warga. Tanggapan saya semoga ada tindakan dari pemerintah Kabupaten.⁶⁸

⁶⁶Wawancara dengan bapak Saipuloh selaku penambang, Penggawa V Ilir, 19 Februari 2021.

⁶⁷Mat Ali, Wawancara selaku penambang pasir sungai, Penggawa V Ilir, 19 Februari 2021.

⁶⁸Darwindi, Wawancara selaku masyarakat setempat, Penggawa V Ilir, 19 Februari 2021.

BAB IV

ANALISIS

A. Peran MUI Dalam Menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 Tentang Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Penambangan Pasir Sungai Way Pedada

Peran MUI dalam menerapkan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 di peroleh dalam memberikan penyuluhan atau sosialisasi di masyarakat yang melakukan penambangan pasir, agar dapat memberikan arahan agar tidak melakukan penambangan pasir yang menjadi kerusakan lingkungan, adapun faktor kelemahan dan faktor peluang, yang salah satunya faktor berasal dari kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 yaitu faktor kelemahan, sedangkan faktor peluang adalah faktor yang disebabkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan pasir sungai.

Yaitu kurang tegaknya peraturan oleh pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa, kurangnya sosialisai, tidak ada sanksi untuk penambangan pasir sungai yang melanggar peraturan pemerintahan Desa, sehingga penambangan dengan bebas melakukan aktivitas penambangan. akan tetapi dalam hal ini ada Fatwa MUI No 22 tahun 2011 setiap orang atau badan tidak boleh melakukan penggalian atau pengerukan tanah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan pejabat dan yang berwenang, tidak merusak ekosistem sungai ataupun menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

Dalam prosedur penambangan pasir sungai di Desa Penggawa V ilir yang dilakukan masyarakat tidak ada izin dari Instansi terkait ataupun pemerintah Desa. Namun masyarakat terus melakukan aktivitas penambangan dan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi dengan penambangan tersebut sehingga menimbulkan kerusakan seperti longsornya bibir sungai, mengikis tanah milik masyarakat setempat.

Kurangnya sosialisasi tentang Fatwa MUI, kurangnya pengawasan dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengenai aktivitas penambangan, maka masyarakat Penggawa V Ilir menganggap bahwa kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu kegiatan yang tidak melanggar hukum dan menghasilkan peluang ekonomi yang lebih untuk menyokong kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan dampak kerusakan yang akan terjadi kedepannya.

B. Pandangan Fiqih Siyasah Mengenai Peran MUI Menerapkan Fatwa No 22 Tahun 2011 Tentang Kerusakan Lingkungan Terhadap Penambangan Pasir Sungai Way Pedada

Dalam konteks fiqih siyasah tentu saja mengatur hubungan penguasa dengan masyarakatnya selama tidak keluar dari syari'at islam, seperti yang tertuang dalam ulil amri yaitu sebuah jabatan yang mempunyai hak tertinggi atau wakil tertinggi dalam sebuah negara atau monarki dan dalam bentuk-bentuk lainnya, penguasa harus memiliki tanggung jawab yang ditetapkan untuk sebuah negara ataupun kekuasaan, dan apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin harus ditaati, selagi itu demi kebaikan masyarakatnya.

Hal yang diperoleh penulis dilapangan yaitu kurangnya sosialisasi ataupun pengarahan dan lembaga pekon mengenai penambangan, dan kurangnya sosialisasi tentang fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011, tentang pertambangan ramah lingkungan. Maka masyarakat pekon Penggawa V Ilir menganggap penambangan pasir sungai di Way Pedada merupakan kegiatan yang tidak melanggar hukum dan menghasilkan ekonomi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta tidak memikirkan dampak yang akan timbul, seperti longsor area tepi sungai yang merupakan sawah dari masyarakat setempat, tentu saja merugikan mereka sendiri.

Peran MUI dalam mensosialisasikan fatwa MUI No 22 Tahun 2011 kerusakan lingkungan terhadap penambangan pasir sungai way pedada tidak memenuhi syarat-syarat hak dan kewajiban sebagai Ulu' al-Amri, selain itu hak terdapat hak rakyat secara umumnya setiap warga negara harus menaati hukum islam, hak persamaan, hak kebebasan, hak memperoleh tanggungan dari negara. Ada dua yang menjadi faktor kendala dalam kebijakan maupun pengawasan yang disebabkan oleh permasalahan yang mendasar, yaitu sisi internal yang terjadi diantaranya adalah antar lembaga kurangnya koordinasi, kurang profesional, anggaran operasional terbatas dan sarana-prasarana yang terbatas, berakibat kurang optimalnya pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan peraturan yang berlaku.

Permasalahan eksternal berasal dari luar pemerintahan Desa, misalnya dari penambang, masyarakat, pengusaha atau pengelola tambang atau lembaga swadaya masyarakat desa. Permasalahan ini kurangnya kesadaran masyarakat

terhadap lingkungan hidup, tuntutan kebutuhan sehari-hari, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti longsornya permukaan tepi sungai dan mengakibatkan pengikisan tanah permukiman maupun sawah penduduk setempat. Oleh karena itu kontrol terus menerus dari pemerintah ataupun lembaga daerah perlu diupayakan, kurangnya sosialisasi fatwa MUI dan peraturan daerah serta pengawasan yang berkerja sama berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Peran MUI Pesisir Barat mempunyai kelamahan dalam mesosialisasikan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh Penambangan Pasir sungai way pedada, dikarnakan kurang sosialisasi Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dan kurang tegaknya peraturan desa. Sehingga masyarakat setempat menganggap bahwa penambangan tersebut tidak melanggar hukum dan menghasilkan peluang ekonomi yang mendongkrak kebutuhan sehari-hari, sehingga masyarakat setempat terus melakukan pertambangan sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, seperti terjadinya pengikisan sehingga membuat longsor di bibir sungai dan mengikis persawahan yang ada di Pekon Penggawa V Ilir. Dan tidak ada izin dari Pemerintah daerah.
2. Pandangan Fiqh siayasah mengenai peran MUI menerapkan fatwa No 22 Tahun 2011 tentang kerusakan lingkungan terhadap panambangan pasir sungai way Pedada, sesuai dengan prinsip ulil amri bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah yang di anjurkan Al-Qur'an. Karena taat kepada ulil amri (Pemimpin) yang bagaimana yang harus kita taati, tidak lain pemimpin yang telah ditentukan Allah dan apabila pemimpin itu melanggar yang telah disyariatkan Allah dan berbuat dzalim tidak boleh ditaat padanya, dilihat

dari fiqih siyasah peran lembaga MUI tidak memenuhi ciri-ciri hak dan kewajiban ulil amri, selain itu pun hak rakyat secara umum nya, setiap warga negara harus diberi semua hak yang ditetapkan dalam hukum islam dan memperoleh tanggung jawab dari neraga. namun ada kendala dalam kebijakan maupun pengawasan yaitu dari sisi pemegang kebijakan adalah pemerintahan yang dapat dilihat dari dua pandang, yaitu sisi internal pemerintahan dan sisi eksternal daerah itu sendiri.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada uraian di atas penulis memberikan rekomendasi kepada :

1. Lembaga MUI Pesisir barat agar dapat mamberikan perhatian khusus terhadap penambangan pasir sungai, serta memberi sosialisasi tentang fatwa MUI dan ikut serta dalam pengawasan dan penindakan
2. Pemerintah Pesisir Barat agar dapat lebih optimal dan tegas dalam menegakan peraturan daerah. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan berkelanjutan. Dan memberikan solusi terhadap masyarakat khususnya Penggawa V Ilir. Supaya tidak ada lagi penambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.
3. Masyarakat Pekon Penggawa V Ilir agar ada kesadaran kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup, tidak menambang pasir sungai agar tidak terjadi kerusakan alam.